

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ERA JOKOWI DALAM ISUPERDAGANGAN BEBAS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan upaya Indonesia untuk mewujudkan visi tersebut. Bab ini juga menjelaskan isu perdagangan bebas dan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas di masa pemerintahan Presiden Jokowi

A. Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Era Jokowi

Setiap negara memiliki tujuan nasional yang diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat didalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri merupakan salah satu upaya yang dijalankan setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional agar dapat mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat dari luar wilayah negaranya. Politik luar negeri erat kaitannya dengan pencapaian tujuan nasional dari suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan politik luar negeri untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 93.000 km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km.

Negara ini berada pada posisi geografis yang strategis di jalur perairan dunia sehingga sangat menguntungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia adalah jalur laut yang menghubungkan laut dari Aceh hingga Papua antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Jalur laut ini merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk mengembangkan negaranya. Selain itu melalui letaknya yang strategis Indonesia dapat melakukan hubungan baik politik maupun ekonomi dengan 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Selain itu Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut untuk mensejahterakan rakyatnya.¹⁷

Potensi negara yang memiliki letak geografis dan geopolitik strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran dan komunikasi internasional yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Rusia, Australia dan negara-negara di sekitar Asia. Menjadi keutungan besar bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, minyak, maupun keindahan wisata lautnya untuk menerapkan konsep poros maritim dunia.

Dari segi sejarahnya yang memanfaatkan laut untuk mengembangkan serta mensejahterakan Indonesia adalah presiden Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang menetapkan negara ini sebagai negara kepulauan, yakni melalui deklarasi

¹⁷Prameswari Surya Anggraeni, "Politik Luar Negeri Indonesia Poros Maritim Dunia di Era Pemerintahan Joko Widodo", (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (2) 347-358 ISSN 2477-2623). ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id

Djoeanda pada 13 Desember 1957. Hal ini dilakukan untuk membentuk jati diri bangsa sekaligus sebagai politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahannya. Hingga pada masa pemerintahan Soeharto, wawasan nusantara sebagai negara kepulauan mulai tidak diprioritaskan karena beliau lebih memprioritaskan pembangunan di darat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini berlangsung hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau masih memprioritaskan basis darat dan memulihkan citra Indonesia.¹⁸

Pada tahun 2014 Joko Widodo terpilih menjadi presiden Indonesia, beliau memiliki program yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia yang merupakan wacana Presiden Joko Widodo serta salah satu kebijakan luar negeri dari Indonesia pada masa pemerintahannya. Dan visi pemerintahannya ialah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong tersebut akan di tempuh oleh Pemerintahan Joko Widodo melalui misi sebagai berikut :¹⁹

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menompang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

¹⁸Ibid hlm 348

¹⁹Media Praja, Majalah Kementrian dalam Negeri, “*Mengawal Poros Pemerintahan*”, (ISSN 1907-3798, Januari 2015), Hlm 6-7

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Setiap era pemerintahan masing-masing presiden di Indonesia memiliki perbedaan terhadap penerapan politik luar negeri di Indonesia. Seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) politik luar negeri Indonesia di tampilkan dengan sosok politik yang *high profile*. Keikutsertaan Indonesia Dalam G-20 secara umum diakui tidak saja sebagai ekspresi pengakuan dunia terhadap perkembangan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. *Thousand friends zero enemy* (seribu kawan, nol musuh) merupakan sebuah semboyan yang hadir mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semboyan tersebut dilandasi atas prinsip tanpa musuh dan banyak teman penting untuk menjadi penekanan netralitas

sikap Indonesia ditengah pusaran gejolak pertentangan. Urgensi untuk menciptakan citra positif diperlukan guna mengklarifikasi kesalahpahaman publik internasional kepada Indonesia yang semula kerap dianggap sebagai surga koruptor, pelanggar Hak Asasi Manusia, dan sarang teroris.²⁰ Dalam derajat tertentu, citra positif tersebut turut berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai pemegang amanah tuan rumah berbagai forum besar internasional seperti Konferensi Asia Afrika (KAA).²¹

Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden menyiratkan perubahan atau perbedaan dalam kinerja politik luar negeri Indonesia. Secara hipotetik Jokowi-JK akan lebih menampilkan politik luar negeri yang *low profile* atau setidaknya mengurangi “terlalu banyak tampil di luar negeri” dan akan lebih fokus pada urusan dalam negeri atau ditunjukkan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat di dalam. Bagi pasangan ini penguatan dan pembangunan ekonomi nasional nampak lebih menarik dan lebih tenang.²²

Kebijakan luar negeri yang di jalankan presiden Jokowi berorientasi kedalam (*Inward-looking*). Argumentasi yang memungkinkan sekaligus membenarkan kebijakan luar negeri yang dianut selama ini ialah prinsip bebas-aktif. Prinsip ini membuka ruang bebas bagi interpretasi dan

²⁰Susilo Bambang Yudhoyono, “*Indonesia Unggul*”: Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan oleh Presiden Republik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2009).

²¹Dino Patti Djalal, “*Harus Bisa* : Seni Kepemimpinan ala SBY”, (Jakarta: R&W, 2009).

²²Mangadar Situmorang, “*Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK*”, hlm 69

pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat,mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong–royong”. Visi tersebut mempertegas makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian,dan kepribadian nasional.

Atas dasar prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan amanat konstitusi, maka dapat pula dikatakan misi atau tujuan kebijakan luar negeri Jokowi-JK selaras. Tujuan tersebut adalah:

1. Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama Internasional.
2. Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan bangsa dan negara Indonesia.
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di Indonesia-Pasifik
4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran,aspirasi dan keterlibatan masyarakat.

Demikian pula dengan empat prioritas yang ditawarkan oleh presiden terpilihnya Jokowi,yakni (1) perlindungan WNI, (2) perlindungan sumber daya alam dan perdagangan; (3) Produktivitas perekonomian; (4) Pertahanan keamanan nasional, regional serta perdamaian dunia. Sementara Jokowi menaruh perhatian khusus pada komitmen pemberian

dukungan bagi kemerdekaan dan keanggotaan Palestina di PBB, Jokowi juga mengedepankan diplomasi total di dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan negara-negara lain.²³

Pemerintahan Presiden Jokowi meletakkan landasan operasional politik luar negeri, sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan rincian sasaran sebagai berikut;

- a. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, yang ditempuh melalui strategi:
 1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) secara konsisten;
 2. Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan perdagangan.

²³ibid hlm 70-71

3. Konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jati diri negara maritim.
 4. Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri dan diplomasi.
 5. Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.
- b. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi;
1. Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat.
 2. Pelaksanaan doktrin poros maritim dunia.²⁴

Dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia beliau mulai melakukan beberapa perubahan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman karena kurangnya prioritas terhadap laut dari era pemerintahan presiden sebelumnya. Sehingga presiden Indonesia ini ingin banyak mengembangkan program yang mengedepankan pertahanan

²⁴ RPJMN 2015-2019. Diakses pada bappenas.go.id.

kemanan, pembangunan Infrastruktur, serta meminimalisir ancaman *illegal fishing*. Beliau juga ingin membangun pandangan yang awalnya berbasis darat ke basis laut. Aktifitas berkait dengan lautan, selat dan teluk akan dikedepankan.

B. Isu Perdagangan Bebas

Pada abad ke 21 Internasionalisasi dari kegiatan masyarakat dunia akan semakin meningkat di hampir semua bidang dan membawa kita pada perkembangan dimana antar negara-negara di dunia saling berkaitan. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat didunia semakin saling membutuhkan satu sama lain tetapi juga saling bersaing.

Hal ini terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia sebagai salah satu bidang utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat di dunia, baik dalam bidang perdagangan barang (*trade in goods*) maupun perdagangan jasa (*trade in services*). Karena dalam berinteraksi secara Internasional satu sama lain dalam perdagangan dunia akan mengalami konflik dan perselisihan-persilihan, maka negara-negara di dunia memerlukan suatu kesepakatan terhadap aturan main tertentu dalam suatu sistem perdagangan global.²⁵

Globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara.

²⁵Syprianus Aristeus, "Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN", (JurnalRechtsVinding ISSN 2089-9009, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014)

Salah satu ciri bisnis yang paling dominan pada globalisasi ekonomi adalah sifatnya bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal ini mempengaruhi pula terhadap berbagai peraturan di bidang bisnis yang dengan cepat pula mengalami perubahan. Globalisasi merupakan fenomena yang tak dapat dihindari oleh siapapun. Ditinjau dari sisi ekonomi, globalisasi merupakan aktivitas dari perusahaan multinasional yang menanamkan investasinya keluar negeri (foreign direct investment/ FDI) dan mengembangkan jaringan yang melintasi batas negara. Ilmuwan sosiologi seperti Anthony Giddens dan John Tomlinson berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, tetapi bersifat multidimensi yang kompleks terkait dengan persoalan ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lain-lain. Globalisasi telah menciptakan dunia yang sempit. Hubungan antar manusia menjadi tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi serta teknologi lainnya yang mendukung cepatnya hubungan antar manusia di berbagai belahan dunia.²⁶

Sejak tahun 1970-an masalah lingkungan telah dirasakan umat manusia sebagai persoalan bersama yang menuntut pengelolaan bersama baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Fenomena-fenomena seperti pemanasan global, lubang ozon, hujan asam menjadi sumber ketakutan bagi umat manusia.

²⁶Suyani Indriastuti, S.Sos, "Pembentukan Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) dan Dampaknya Bagi Petani di Indonesia", (Vol. 1 No. 2, 2005 : Hal : 24 – 37)

Komitmen negara-negara maju dan berkembang untuk melestarikan lingkungan hidup tidak diragukan lagi.²⁷

Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi (GNP, pembangunan, industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan.

Dalam era perdagangan bebas, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antar negara. Secara normatif pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan global dari efek-efek negative yang muncul dari deras nya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara-negara berkembang kebijakan seperti ini dipandang lebih merupakan politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang terutama pada jenis komoditi yang ber-basiskan sumber daya alam dan yang pa-dat

²⁷Anna YuliaHartati, "Perdagangan Bebas dan Lingkungan Hidup dalam Prepektif Postmodernisme (Melihat Kasus Penerapan Standarisasi Lingkungan)", (Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, SPEKTRUM Vol. 5, No. 2, Juni 2008), hlm 38.

karya. Pada komoditi jenis ini negara negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negaranegara maju, sehingga muncul istilah *disguised non tariff trade barrier*, di-mana lingkungan dilihat sebagai ham-batan non tarif yang tersamar dalam perdagangan.²⁸

Hampir semua negara di dunia saat ini mengalami keterbukaan perekonomian yang ditandai oleh globalisasi ekonomi, hal tersebut telah membuat sistem perekonomian menjadi terbuka bebas. Perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, maka akan tercipta suatu keseimbangan (*equilibrium*). Dalam model pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), pasar bersifat *self regulating* dan *self correcting* karena ada tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang selalu dapat mengarahkan perekonomian pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh (*full equilibrium*) yang menguntungkan semua pihak dalam masyarakat. Salah satu asumsi penting dalam sistem ekonomi pasar bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith melalui teori *klasik laissez faire*nya adalah bahwa setiap orang di bebaskan melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing (*individual freedom of action*). Dalam sistem ini keputusan tadi pada akhirnya akan menyumbangkan sebisa mungkin bagi terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik yang lebih adil, dan yang lebih makmur.²⁹

²⁸Ibid hlm 39

²⁹Syprianus Aristeus, Op.cit., hlm 147

Di era globalisasi ekonomi setiap negara menghadapi persaingan yang semakin ketat di dua medan perang yakni perdagangan bebas serta *foreign direct investment*/FDI. Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikannya perjanjian perdagangan bebas (free trade Agreement/FTA) dan perjanjian investasi (investasi agreement) serta kemajuan teknologi informasi, yang menjadikan semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional yang semakin bebas dan keluar masuknya arus modal dan investasi di tiap-tiap negara. Dampak dari bergulirnya era globalisasi ini akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara negara-negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu bertahan.

Dengan adanya perdagangan bebas, tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lain. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk. Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi anatar negara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Dengan demikian kalangan industry dapat mengimpor barang yang dibutuhkan untuk memacu kegiatan produksi dan mengekspor produk jadi ke pasar regional demi memperbaiki volume perdagangan dalam negeri.

C. Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Bebas

Implementasi Free Trade Agreement (FTA) sebagai pola umum yang ditempuh dalam rangka pembentukan kawasan bebas perdagangan antar negara. Menurut teori dagang internasional, FTA diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari perdagangan ini, yang berasal dari konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan mengkhususkan diri dalam menghasilkan suatu produk jika memiliki keuntungan komparatif. Dengan pengkhususan macam ini, secara umum dunia dapat mengembangkan keluaran dunia total (*total world output*) dengan jumlah sumber daya yang sama, dan pada saat yang sama efisiensi ekonomi akan terus meningkat. Hasilnya, secara teoritis, sebuah FTA dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini, akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan dagang (*trade diversion*).

Tren terbaru dari FTA menunjukkan bahwa banyak negara-negara di dunia telah terlibat di berbagai perjanjian dagang, baik perjanjian dagang bilateral maupun regional. Grafik 2.1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah FTA secara signifikan sejak tahun 2002³⁰

Pemerintah Indonesia meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA melakukan kerjasama China (ASEAN-China FTA) pada tahun 2004,

³⁰Amalia Adininggar Widiasanti, "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia", (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010) hlm 6

dengan Korea (ASEAN-Korea FTA) pada tahun 2007 dengan India (ASEAN-India FTA) pada tahun 2010, dengan Australia dan New Zealand (ASEAN- Australia - New Zealand FTA) pada tahun 2010 dan terakhir dengan Jepang (ASEAN- Japan Comprehensive Economic Partnership) pada tahun 2010.³¹

Tabel 2.1 Perkembangan Implementasi FTA oleh Indonesia

No	PerjanjianPerdaganganBebasRegional	BerlakunyaPerjanjianPerdaganganBebas	Bergabungnya Indonesia
1.	ASEAN FTA	2002	2002
2.	ASEAN-China FTA	2004	2004
3.	ASEAN-Korea FTA	2007	2007
4.	ASEAN-India FTA	2010	2010
5.	ASEAN-Australia-New Zealand FTA	2010	2010
6.	ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership	2010	-

No	PerjanjianPerdaganganBebas Bilateral	Berlakunya
1.	Indonesia-Japan Economic Partnership	2007

Sumber: Kajian FTA BKF

Dari table diatas dapat dilihat bahwa berbagai ratifikasi FTA ASEAN dengan berbagai Negara tersebut telah berlaku untuk Indonesia namun masih ada beberapa yang masih dalam proses untuk ratifikasi

³¹BKF Kemenkeu, "Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra", (Laporan Hasil Kajian 2012), hlm 2

(Indonesia *entry into force*), misalnya untuk perjanjian ASEAN- Japan Comprehensive Economic Partnership (ASEAN-Japan CEP).³²

Implementasi FTA saat ini sebagaisalah satu bentuk kerja sama internasional memang tidak bisa lagi kita hindari, karena :

1. Merupakan salah satu implikasi dari arus globalisasi dan meningkatnya interdependensi antara negara yang satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
2. Bentuk konsekuensi dan komitmen sebagai anggota organisasi regional dan internasional, seperti ASEAN, WTO dan sebagainya. Walaupun demikian keikutsertaan ini harus tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan nasional.
3. Tuntutan dunia usaha akan kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, tanpa hambatan baik tariff maupun non tarif, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas produk atau barangbarang dan jasa tertentu.

Dengan adanya FTA keuntungan bagi Indonesia adalah potensi peningkatan volume perdagangan, melalui *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* misalnya Cambodia yang sebelumnya tidak pernah mengimpor obat-obatan, sekarang mampu mengimpor dari Indonesia, karena adanya penurunan tarif bea masuknya. Untuk *Trade diversion* misalnya adalah Indonesia yang sebelumnya mengimpor beras

³²Loc.cit.

dari China, sekarang beralih mengimpor dari Thailand, karena praktis biayanya menjadi lebih murah. Selain itu FTA juga memacu kinerja ekspor dan mengembangkan industri, sehingga menyerap banyak tenaga kerja, serta membuka peluang bagi produsen untuk pelaku ekonomi untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Khusus untuk AFTA, ada manfaat lain yaitu terjadinya pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi akibat terbentuknya spesialisasi di antara para pelaku industri dan perdagangan di negara-negara anggota ASEAN.³³

Melihat perkembangan global maupun di wilayah ASEAN, komponen liberalisasi investasi tidak lagi memberikan perlakuan preferensial bagi investor ASEAN. Dalam banyak hal tidaklah tepat bagi negara-negara ASEAN bahwa dalam rangka liberalisasi rejim investasi mereka negara-negara ASEAN harus mendapat preferensi yang sama diberikan kepada investor-investor non-ASEAN.

Sebagaimana dikatakan selain pasar tunggal ASEAN yang berlaku tahun 2015, sebelumnya telah ada 19 kesepakatan sejak tahun 2011 mengenai perdagangan bebas (FTA) dimana 7 diantaranya telah berjalan, 1 belum mulai berlaku, tiga masih dalam status negosiasi, dua dalam status negosiasi, tetapi kerangka kesepakatannya sudah di tandatangani, serta 6 masih berstatus usulan. Dari tujuh yang telah berjalan hanya satu yang FTA bilateral, yakni kesepakatan kemitraan ekonomi (EPA) Indonesia-

³³Wawancara dengan Drs. Frans Rupang, "*Penerapan FTA AntaraHarapandanKenyataan*", (Direktur Kepabeanan Internasional DJBCEDUKASI KEUANGAN n EDISI 11/2012).

jepang, sedangkan enam sisanya FTA yang ditandatangani Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, termasuk AFTA.³⁴

Selain skema perjanjian kerja sama dalam bidang perdagangan internasional tersebut, saat ini juga Indonesia sedang dalam proses persiapan dengan beberapa skema kerja sama perdagangan internasional yang lainnya. Table 2.2 menggambarkan jenis skema kerja sama tersebut serta tahap perkembangannya.

Tabel 2.2: Perkembangan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia

No	Skemakerjasama	TahapPerkembangan
1.	Indonesia – European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE – CEPA)	Putaran ketiga negosiasi
2.	Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)	Konsultasi sebelum negosiasi
3.	Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (II-CECA)	Peluncuran Negosiasi
4.	Indonesia - Pakistan Preferential Trade Agreement	Puataran keenam negosiasi
5.	Indonesia - Iran Preferential Trade Agreement	Putaran pertama negosiasi
6.	Indonesia – Chile	Kesimpulan bergabungke Study Group (JSG)
7.	Indonesia – Turkey	Kesimpulan JSG
8.	Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia – UniEropa	Rekomendasi pembentukan
9.	Indonesia – Tunisia	Berlangsung JSG
10.	Indonesia – Mesir	Pembentukan JSG
11.	Indonesia - Korea Selatan	Putaranketiganegosiasi

Sumber: www.ditjenkpi.kemendag.go.id diakses 17 Desember 2016

Pada tabel 2 tersebut maka skema kerja sama yang ada terlihat lebih menonjol dalam bentuk skema kerja sama bilateral. Yaitu skema kerja sama antara dua negara, Indonesia dan negara mitra, seperti: Pakistan, Iran, Chile, Turkey, Tunisia, Mesir, dan Korea Selatan. Sisanya,

³⁴Syprianus Aristeus, Op.cit., hlm 55.

merupakan skema Comprehensive Economic Partnership/Cooperation Agreement (CEPA/CECA). Yaitu skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari hanya sekedar isu perdagangan semata, CEPA/CECA biasanya memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga, yang terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi; baik itu dilakukan secara bilateral, seperti dilakukan dengan Australia dan India, maupun dilakukan dengan blok kerja sama ekonomi, seperti dengan European Free Trade Association (EFTA) dan Uni Eropa.³⁵

Pada masa pemerintahan Jokowi, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk kepentingan nasional, yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi, akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.³⁶

Tanggal 26 Oktober 2015 presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat, dalam pertemuannya di Gedung Putih, sejumlah masalah krusial dibicarakan, dari kerja sama ekonomi, perubahan iklim, hingga

³⁵BKF Kemenkeu, LAPORAN HASIL KAJIAN, "*Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2*" , (Tim Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 2013)

³⁶Paparan Menlu mengenai rencana politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan pada konferensi pers pertamanya di Gedung Pancasila, Rabu, 29 Oktober 2014. (Dikutip pada tabloid diplomasi No.81) hlm 23.

terorisme. Salah satu hal menarik dari kunjungan tersebut adalah pernyataan presiden Jokowi di hadapan pers, menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dalam kesepakatan perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), bersama 12 negara lainnya yang telah meneken perjanjian dagang ini pada awal Oktober 2015. Di hadapan pers, Jokowi menyatakan keinginannya bergabung dalam TPP karena ekonomi Indonesia adalah terbesar di kawasan Asia Tenggara. *Trans-Pacific Partnership* adalah bagian dari strategi AS untuk mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang saat ini berada di urutan kedua, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.³⁷

³⁷ Fransisca Ria Susanti 29 Oktober 2015, "Siasat Luar Negeri Jokowi Jokowi menyatakan keinginannya bergabung dalam TPP", (29 Oktober 2015) Tersedia <http://www.gelora45.com/news/SiasatLuarNegeriJokowi.pdf> [Diakses pada 12 Desember 2016, pukul 19.43]